



INSPEKTORAT
KABUPATEN WONOGIRI

LAPORAN KEUANGAN TA 2025

Jalan Pemuda I / 55 Wonogiri, Jawa Tengah, Kode Pos 57612
Telepon (0273) 321138 Faksimile (0273) 321138
Laman www.inspektorat.wonogirikab.go.id
Pos-el inspektorat@wonogirikab.go.id

KATA PENGANTAR

Laporan Keuangan Inspektorat Kabupaten Wonogiri ini merupakan laporan yang menggambarkan tentang pertanggungjawaban keuangan yang dikelola oleh Inspektorat Kabupaten Wonogiri untuk Tahun Anggaran 2025.

Laporan Keuangan ini terdiri dari 5 (lima) macam yaitu :

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Operasional
3. Laporan Perubahan Ekuitas
4. Neraca
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa laporan keuangan ini dilampiri dengan surat pernyataan Inspektur Kabupaten Wonogiri yang menyatakan bahwa pengelolaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai serta telah menerapkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa laporan keuangan ini masih jauh dari sempurna, namun demikian untuk aspek pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, kami telah berupaya untuk selalu mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan, sehingga hasilnya pun diharapkan tetap sesuai dengan ketentuan.

Oleh karena itu untuk kesempurnaan laporan keuangan ini, kami mohon saran dan masukan sekaligus koreksi dari semua pihak yang terkait, dengan harapan pada tahun-tahun yang akan datang Laporan Keuangan Inspektorat Kabupaten Wonogiri dapat disusun dan tersaji dengan lebih baik.

Wonogiri, 18 Februari 2026
INSPEKTUR KABUPATEN WONOGIRI

MARDIANTO, S.E.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19710124 199903 1002



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI INSPEKTORAT

Jalan Pemuda I Nomor 55 Wonogiri 57612
Telepon (0273) 321138 Faks. (0273) 321138
E-mail : inspektorat@wonogirikab.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Inspektorat Kabupaten Wonogiri yang terdiri dari :

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Operasional;
- c. Laporan Perubahan Ekuitas;
- d. Neraca per 31 Desember 2025;
- e. Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025.

Sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami :

1. Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan system pengendalian intern yang memadai serta sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan yang berbasis akrual;
2. Data dan angka-angka yang tercantum dalam Laporan Keuangan yang kami buat sudah di cross cek dengan Bidang Akuntansi BPKD Kabupaten Wonogiri dan sudah memadai untuk menjadi bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wonogiri, 18 Februari 2026

INSPEKTUR KABUPATEN WONOGIRI

Sebagai Pengguna Anggaran



MARDIANTO, S.E.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19710124 199903 1002

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**INSPEKTORAT KABUPATEN WONOGIRI
TAHUN ANGGARAN 2025**



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
SKPD : 6.01.0.00.0.00.26.0000 INSPEKTORAT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

1-1

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6
5.	BELANJA DAERAH	8.744.904.562,00	7.437.578.238,00	85,05	7.282.653.749,00
5.1.	BELANJA OPERASI	8.626.595.062,00	7.325.368.238,00	84,92	7.237.648.749,00
5.1.01.	Belanja Pegawai	7.492.023.755,00	6.331.824.516,00	84,51	5.674.280.211,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.134.571.307,00	993.543.722,00	87,57	1.563.368.538,00
5.2.	BELANJA MODAL	118.309.500,00	112.210.000,00	94,84	45.005.000,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	118.309.500,00	112.210.000,00	94,84	43.080.000,00
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	-	100,00	1.925.000,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(8.744.904.562,00)	(7.437.578.238,00)	85,05	-

Wonogiri, 31 Desember 2025

Pengguna Anggaran



Mardianto, SE

NIP. 19710124 199903 1 002

LAPORAN OPERASIONAL

**INSPEKTORAT KABUPATEN WONOGIRI
TAHUN ANGGARAN 2025**



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
INSPEKTORAT
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Kode Rekening	URAIAN	2025	2024	(%)
1	2	3	4	5
7.	PENDAPATAN DAERAH			
7.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
7.1.01.	Pajak Daerah	-	-	-
7.1.02.	Retribusi Daerah	-	-	-
7.1.03.	Hasil Pengelaaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-
7.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-
7.2.	PENDAPATAN TRANSFER			
7.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	-	-	-
7.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	-	-	-
7.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH			
7.3.01.	Pendapatan Hibah	-	-	-
7.3.02.	Dana Darurat	-	-	-
7.3.03.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-
	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-	-
7.5.	PENDAPATAN LUAR BIASA			
7.5.01.	Pendapatan Luar Biasa	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN LUAR BIASA	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-
8.	BEBAN DAERAH			
8.1.	BEBAN OPERASI			
8.1.01.	Beban Pegawai	6.331.824.516,00	5.479.804.452,00	15.55
8.1.02.	Beban Barang dan Jasa	991.378.190,00	1.561.979.224,00	(36.53)
8.1.03.	Beban Bunga	-	-	-
8.1.04.	Beban Subsidi	-	-	-
8.1.05.	Beban Hibah	-	-	-
8.1.06.	Beban Bantuan Sosial	-	-	-
8.1.07.	Beban Penyisihan Piutang	-	-	-
8.1.08.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	77.229.087,81	76.265.712,81	1.26
	JUMLAH BEBAN OPERASI	7.400.431.793,81	7.118.049.388,81	3.97
8.2.	BEBAN TRANSFER			
8.2.01.	Beban Bagi Hasil	-	-	-
8.2.02.	Beban Bantuan Keuangan	-	-	-
	JUMLAH BEBAN TRANSFER	-	-	-
8.3.	DEFISIT NON OPERASIONAL-LO			
8.3.01.	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	28.700.900,00	-	-
8.3.02.	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	-	-	-
8.3.03.	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	-	-	-
	JUMLAH DEFISIT NON OPERASIONAL-LO	28.700.900,00	-	-

(dalam Rupiah)

Kode Rekening	URAIAN	2025	2024	(%)
1	2	3	4	5
8.4.	BEBAN LUAR BIASA			
8.4.01.	Beban Luar Biasa	-	-	-
	JUMLAH BEBAN LUAR BIASA	-	-	-
8.5.	Beban Lain-Lain			
8.5.01.	Beban Lain-Lain	-	-	-
	JUMLAH BEBAN LAIN-LAIN	-	-	-
	JUMLAH BEBAN	7.429.132.693,81	7.118.049.388,81	4.37
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(7.429.132.693,81)	(7.118.049.388,81)	4.37
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	-	-	-
7.4.	SURPLUS NON OPERASIONAL			
7.4.01.	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar	-	-	-
7.4.02.	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-
7.4.03.	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	-	-
	JUMLAH SURPLUS NON OPERASIONAL	-	-	-
	SURPLUS/DEFISIT DARI NON OPERASI	-	-	-
	SURPLUS/DEFISIT DARI LO	(7.429.132.693,81)	(7.118.049.388,81)	4.37

Wonogiri, 31 Desember 2025

Pengguna Anggaran



SIPKD

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**INSPEKTORAT KABUPATEN WONOGIRI
TAHUN ANGGARAN 2025**



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

6.01.0.00.0.00.26.0000 INSPEKTORAT

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Untuk Periode yang Berakhir Sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN	2025	2024
Ekuitas	1.042.330.513,56	877,726,153.37
RK PPKD	7.437.578.238,00	7,282,653,749.00
Surplus/Defisit-LO	(7.429.132.693,81)	(7,118,049,388.81)
JUMLAH EKUITAS AKHIR	1.050.776.057,75	1,042,330,513.56

Wonogiri, 31 Desember 2025

PENGUNA ANGGARAN



NERACA

**INSPEKTORAT KABUPATEN WONOGIRI
TAHUN ANGGARAN 2025**



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
6.01.0.00.0.00.26.0000 INSPEKTORAT
NERACA

Halaman 1 dari 1

No	Uraian	Jumlah (Rp)	
		2025	2024
1	2	3	4
1	ASET	1.053.994.988,75	1.045.502.776,56
2	ASET LANCAR	5.526.400,00	4.244.200,00
3	Persediaan	5.526.400,00	4.244.200,00
4	ASET TETAP	1.048.468.588,75	1.012.557.676,56
5	Tanah	779.922.000,00	779.922.000,00
6	Peralatan dan Mesin	2.461.399.738,00	2.103.757.238,00
7	Gedung dan Bangunan	492.223.350,00	492.223.350,00
8	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.925.000,00	1.925.000,00
9	Aset Tetap Lainnya	25.277.445,00	25.277.445,00
10	Akumulasi Penyusutan	(2.712.278.944,25)	(2.390.547.356,44)
11	ASET LAINNYA	-	28.700.900,00
12	Aset Lain-lain	-	73.695.963,00
13	Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat	-	(44.995.063,00)
	JUMLAH ASET	1.053.994.988,75	1.045.502.776,56
15	KEWAJIBAN	3.218.931,00	3.172.263,00
16	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	3.218.931,00	3.172.263,00
17	Utang Belanja	3.218.931,00	3.172.263,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	3.218.931,00	3.172.263,00
19	EKUITAS	1.050.776.057,75	1.042.330.513,56
20	EKUITAS	1.050.776.057,75	1.042.330.513,56
21	Ekuitas	(6.386.802.180,25)	(6.240.323.235,44)
22	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	7.437.578.238,00	7.282.653.749,00
	JUMLAH EKUITAS DANA	1.050.776.057,75	1.042.330.513,56
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	1.053.994.988,75	1.045.502.776,56

Pengguna Anggaran
Mardianto, SE
NIP. 19710724 199903 1 002

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(CALK)**

**INSPEKTORAT KABUPATEN WONOGIRI
TAHUN ANGGARAN 2025**

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Tabel	ii
BAB I Pendahuluan	1
A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	7
C. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan	8
BAB II Kebijakan Keuangan dan Capaian Kinerja	10
A. Kebijakan Keuangan	10
B. Capaian Kinerja	11
BAB III Ihtisar Pencapaian Kinerja Keuangan	21
A. Ihtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	21
B. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	22
BAB IV Kebijakan Akuntansi	23
A. Entitas Pelaporan keuangan Daerah	23
B. Akuntansi Pendapatan	24
C. Akuntansi Belanja	25
D. Akuntansi Beban	26
E. Pengakuan Aset Tetap dan Kapitalisasi Pengeluaran	27
BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan	35
A. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	35
B. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional	38
C. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	44
D. Penjelasan Pos-Pos Neraca	44
BAB VI Pengungkapan Lainnya, Informasi Non Keuangan	50
A. Organisasi	50
B. Kebijakan	51
C. Struktur Kepegawaian/SDM	55
BAB VII Penutup	58

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Realisasi Indikator Kinerja per Sasaran Strategis	14
Tabel 3.1. Realisasi APBD TA. 2024	21
Tabel 3.2. Realisasi Anggaran Per Program	22
Tabel 5.1. Realisasi Anggaran Per Kelompok dan Jenis Belanja	35
Tabel 5.2. Perincian Belanja Pegawai	36
Tabel 5.3. Perincian Barang dan Jasa	37
Tabel 5.4. Perincian Belanja Modal	38
Tabel 5.5. Perincian Beban	38
Tabel 5.6. Perincian Beban Pegawai	39
Tabel 5.7. Perincian Beban Barang & Jasa	40
Tabel 5.8. Perincian Beban Barang	40
Tabel 5.9. Perincian Beban Jasa	41
Tabel 5.10. Perincian Beban Pemeliharaan	42
Tabel 5.11. Perincian Beban Perjalanan Dinas	43
Tabel 5.12. Perincian Beban Penyusutan Peralatan & Mesin	43
Tabel 5.13. Perincian Beban Penyusutan Gedung & Bangunan	44
Tabel 5.14. Perincian Aset Tetap menurut Jenis	44



BAB I

PENDAHULUAN

A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan (SAP, 2010). Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan Keuangan Inspektorat Kabupaten Wonogiri disusun untuk menyediakan informasi mengenai Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan selama satu periode pelaporan.

Inspektorat Kabupaten Wonogiri selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :



a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Inspektorat Kabupaten Wonogiri dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundangan.

2. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya (SAP, 2010).



Pelaporan keuangan Inspektorat Kabupaten Wonogiri menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna anggaran dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan :

- a. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- b. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- c. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- d. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya.
- e. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Komponen laporan keuangan Inspektorat Kabupaten Wonogiri terdiri dari :

- a. Laporan Realisasi Anggaran
- b. Laporan Operasional
- c. Laporan Perubahan Ekuitas
- d. Neraca
- e. Catatan atas Laporan Keuangan



Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Inspektorat Kabupaten Wonogiri dalam satu periode pelaporan. Tujuan pelaporan realisasi anggaran untuk memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dengan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara eksekutif dengan legislatif sesuai peraturan perundang-undangan (SAP, 2010). Laporan realisasi anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Pendapatan
- b. Belanja
- c. Transfer
- d. Surplus/defisit
- e. Pembiayaan
- f. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran

Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan - LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Pengguna laporan membutuhkan Laporan Operasional dalam mengevaluasi



pendapatan - LO dan beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas pemerintahan. Laporan Operasional menyediakan informasi :

- a. mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk menjalankan pelayanan;
- b. mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi, efektivitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- c. yang berguna dalam memprediksi pendapatan - LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif;
- d. mengenai penurunan ekuitas (bila defisit operasional), dan peningkatan ekuitas (bila surplus operasional).

Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari Ekuitas Awal, Surplus/Defisit - LO pada periode bersangkutan, Koreksi-Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya atau perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap, serta Ekuitas Akhir.



Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu (SAP, 2010). Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah yang diharapkan dapat diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut :

- a. Aset Lancar
- b. Aset Tetap
- c. Aset Lainnya
- d. Kewajiban Jangka Pendek
- e. Kewajiban Jangka Panjang
- f. Ekuitas Dana Lancar
- g. Ekuitas Dana Investasi

Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan-penjelasan naratif, analisis atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran dan neraca. Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut :



- a. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- b. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah.
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;



- j. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
- k. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 77 Tahun 2025 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Wonogiri;
- l. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 78 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Wonogiri;
- m. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 42 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- n. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 11 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri yang telah mengalami perubahan terakhir diubah dengan Peraturan Bupati Wionogiri Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri.

C. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB I PENDAHULUAN

- A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- C. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

- A. Kebijakan Keuangan
- B. Capaian Kinerja



BAB III IKHTISAR CAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

- A. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- B. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

- A. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah dan Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- B. Akuntansi Pendapatan
- C. Akuntansi Belanja
- D. Akuntansi Beban
- E. Pengakuan Aset Tetap dan Kapitalisasi Pengeluaran

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN.

- A. Penjelasan Pos - Pos Laporan Realisasi Anggaran
- B. Penjelasan Pos - Pos Laporan Operasional
- C. Penjelasan Pos - Pos Laporan Perubahan Ekuitas
- D. Penjelasan Pos - Pos Neraca

BAB VI PENGUNGKAPAN LAINNYA, INFORMASI NON KEUANGAN

- A. Organisasi
- B. Kebijakan
- C. Struktur Kepegawaian / SDM

BAB VII PENUTUP



BAB II

KEBIJAKAN KEUANGAN DAN CAPAIAN KINERJA

A. Kebijakan Keuangan

Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Perda Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri.

Kebijakan Belanja pada KUA Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2025 fokus pada :

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan yang terdiri dari 2 (dua) Kegiatan dan 9 (sembilan) Sub Kegiatan;
2. Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi yang terdiri dari 2 (dua) Kegiatan dan 6 (enam) Sub Kegiatan;
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 7 (tujuh) Kegiatan dan 25 (dua puluh lima) Sub Kegiatan.

Sedangkan Perubahan KUA Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2025 mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Efisiensi dilakukan pada rekening belanja Perjalanan Dinas Biasa, rekening belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota, rekening belanja Makanan dan Minuman



Rapat, rekening belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu serta rekening belanja Alat Tulis Kantor.

Secara umum Perubahan APBD Tahun 2025 pada Inspektorat Kabupaten Wonogiri mengalami kenaikan sebesar Rp 165.005.524,00 tetapi ada efisiensi belanja diluar belanja pegawai sebesar Rp 358.544.476,00. Sedangkan untuk belanja pegawai mengalami kenaikan sebesar Rp 523.550.000,00. Kenaikan ini terjadi karena adanya Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi RI, dan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor : HK.01.00/SE.3/K/D3/2024 tentang Penguatan Aparatur Pengawas Internal Pemerintah Daerah, poin a Nomor 5, untuk mengalokasikan anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Inspektorat Daerah berdasarkan kriteria tertentu.

B. Capaian Kinerja

Pengawasan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dan strategis dalam manajemen pemerintahan yang perlu dioptimalkan perannya dalam mendukung kelancaran dan ketepatan dalam penyelenggaraan tugas-tugas umum dan pembangunan guna mendukung terselenggaranya sistem pemerintahan yang baik.

Tujuan pengawasan dimaksudkan sebagai fungsi kontrol agar pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan dapat dilakukan secara tertib berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan serta sesuai prinsip efisien, efektif dan ekonomis, sebagaimana fungsi manajemen pemerintahan dan pembangunan. Inspektorat Kabupaten Wonogiri mempunyai tugas pokok



membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Pemerintah Daerah.

Pada Tahun Anggaran 2025, Inspektorat Kabupaten Wonogiri mendapatkan alokasi dana APBD sebesar Rp 8.579.899.038,00, sedangkan pada APBD Perubahan tahun 2025 mendapat alokasi dana sebesar Rp8.744.904.562,00 atau mengalami kenaikan sebesar 0,02 % dari APBD Penetapan Tahun 2025. Sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2025, pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Wonogiri meliputi :

1. Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah : 9 laporan, terealisasi : 9 laporan (100 %);
2. Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah : 5 laporan, terealisasi : 5 laporan (100 %);
3. Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja : 53 laporan, terealisasi : 53 laporan (100 %);
4. Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan : 1 laporan, terealisasi : 1 laporan (100 %);
5. Sub Kegiatan Pengawasan Desa : 30 laporan, terealisasi : 30 laporan (100 %);
6. Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal : 1 kesepakatan, terealisasi : 1 kesepakatan (100 %);



7. Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP : 37 dokumen, terealisasi : 37 dokumen (100 %);
8. Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah : 2 laporan, terealisasi : 2 laporan (100 %);
9. Sub Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu : 125 laporan, terealisasi : 130 laporan (104 %);
10. Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan : 2 rekomendasi, terealisasi : 2 rekomendasi (100 %);
11. Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan : 10 rekomendasi, terealisasi : 10 rekomendasi (100 %);
12. Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah : 53 Perangkat Daerah, terealisasi : 53 Perangkat Daerah (100 %);
13. Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi : 53 Perangkat Daerah, terealisasi : 53 Perangkat Daerah (100 %);
14. Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi : 5 kegiatan, terealisasi : 5 kegiatan (100 %);
15. Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas: 53 Perangkat Daerah, terealisasi : 53 Perangkat Daerah (100 %);



Tabel 2.1.

Realisasi Indikator Kinerja per Sasaran Strategis

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Meningkatnya efektivitas pengawasan	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3	2 Skor : 2,963	66,67%	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase realisasi pengawasan sesuai PKPT	100%	108,12%	108,12%
						Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	136 laporan	136 laporan	100%
						Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	9 laporan	9 laporan	100%
						Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	5 laporan	5 laporan	100%
						Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	53 laporan	53 laporan	100%
						Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 laporan	1 laporan	100%
						Sub Kegiatan Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	30 laporan	30 laporan	100%
						Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 kesepakatan	1 kesepakatan	100%
						Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	37 dokumen	37 dokumen	100%



Pemerintah Kabupaten Wonogiri
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025

						Kegiatan	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	127 laporan	132 laporan	104%
						Sub Kegiatan	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	2 laporan	2 laporan	100%
						Sub Kegiatan	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	125 laporan	130 laporan	104%
						PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		Persentase Realisasi Reformasi Birokrasi Komponen Penguatan Pengawasan	100%	100%	100%
						Kegiatan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah laporan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	12 laporan	12 laporan	100%
						Sub Kegiatan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	2 rekomendasi	2 rekomendasi	100%
						Sub Kegiatan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	10 rekomendasi	10 rekomendasi	100%
						Kegiatan	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah laporan pendampingan & Asistensi	9 laporan	9 laporan	100%
						Sub Kegiatan	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	53 perangkat daerah	53 perangkat daerah	100%
						Sub Kegiatan	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian	53 perangkat daerah	53 perangkat daerah	100%



Pemerintah Kabupaten Wonogiri
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025

							Reformasi Birokrasi			
						Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	5 kegiatan	5 kegiatan	100%
						Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	53 perangkat daerah	53 perangkat daerah	100%
2.	Meningkatnya kinerja Inspektorat	Nilai SAKIP Inspektorat	83	80,25	96,69%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tertib pelaporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	100%	98,41%	98,41%
		Indeks profesionalitas ASN Inspektorat	88,5	n/a	n/a	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan administrasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	100%	100%	100%
		Jumlah ASN Inspektorat yang menjadi agen perubahan	4	4	100%	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	3 dokumen	100%
		Jumlah Inovasi Inspektorat	1	1	100%	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	1 laporan	100%
		IKM Inspektorat	86	86,32	100,4%	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan daerah yang disusun	100%	105%	105%
						Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 orang/bulan	44 orang/bulan	107%



Pemerintah Kabupaten Wonogiri
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025

						Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	100%
						Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 laporan	13 laporan	100%
						Kegiatan	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase administrasi barang daerah pada Perangkat Daerah yang disusun	100%	100%	100%
						Sub Kegiatan	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5 dokumen	5 dokumen	100%
						Kegiatan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi kepegawaian	100%	100%	100%
						Sub Kegiatan	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	8 unit	8 unit	100%
						Sub Kegiatan	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	24 dokumen	24 dokumen	100%
						Sub Kegiatan	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 dokumen	12 dokumen	100%



Pemerintah Kabupaten Wonogiri
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025

						Sub Kegiatan	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	1 dokumen	100%
						Sub Kegiatan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 orang	50 orang	100%
						Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Umum perangkat daerah	100%	100%	100%
						Sub Kegiatan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%
						Sub Kegiatan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%
						Sub Kegiatan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%
						Sub Kegiatan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%
						Sub Kegiatan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%
						Sub Kegiatan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	12 dokumen	100%
						Sub Kegiatan	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20 laporan	20 laporan	100%



Pemerintah Kabupaten Wonogiri
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025

						Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 laporan	15 laporan	100%
						Sub Kegiatan	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 dokumen	2 dokumen	100%
						Sub Kegiatan	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100%
						Kegiatan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelaksanaan pengadaan barang milik daerah	100%	100%	100%
						Sub Kegiatan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 unit	12 unit	100%
						Sub Kegiatan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 unit	3 unit	100%
						Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100%
						Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	12 laporan	100%
						Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	100%



Pemerintah Kabupaten Wonogiri
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025

						Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	100%
						Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	100%
						Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100%	100%	100%
						Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 unit	2 unit	100%
						Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 unit	11 unit	100%
						Sub Kegiatan	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	3 unit	3 unit	100%
						Sub Kegiatan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	10 unit	100%
						Sub Kegiatan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	100%



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

A. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Indikator Anggaran dan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Realisasi APBD TA 2025

No	APBD	Anggaran	Realisasi	%	Target	Naik/Turun/ Hemat
1	Pendapatan	-	-	-	-	-
2	Belanja	8.744.904.562,00	7.437.578.238,00	85,05%	-	hemat

Belanja

Belanja Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp 8.744.904.562,00 dengan realisasi sebesar Rp 7.437.578.238,00 atau 85,05%. Adapun rincian dari belanja tersebut adalah sebagai berikut :

1. Belanja Operasi

Jumlah Pagu Anggaran Belanja Operasi adalah Rp. 8.626.595.062,00 dengan realisasi sebesar Rp 7.325.368.238,00 atau 84,92%, yang meliputi Belanja Pegawai sebesar Rp. 6.331.824.516,00 dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 993.543.722,00.

Realisasi Belanja Operasi hanya mencapai 84,92% karena realisasi belanja pegawai hanya mencapai 84,51%. Hal ini disebabkan adanya pegawai yang memasuki usia pensiun dan ada pegawai yang mengambil BT.



2. Belanja Modal

Jumlah Pagu Anggaran Belanja Modal adalah Rp 118.309.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 112.210.000,00 atau 94,84%

Adapun rincian belanja per program sebagai berikut :

Tabel 3.2.
Realisasi Anggaran per Program

No	Uraian Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	8.284.534.412	6.785.112.804	1.499.421.608
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	262.910.250	217.021.160	45.889.090
3	Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	197.459.900	188.361.700	9.098.200

B. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Berdasarkan pada analisa permasalahan yang dilakukan atas keseluruhan program dan kegiatan selama Tahun Anggaran 2025 dari sisi sistem dan prosedur administrasi keuangan, maka dapat dirumuskan hambatan dan kendala yang dihadapi sebagai berikut :

1. Inspektorat Kabupaten Wonogiri harus melakukan penyesuaian dengan di keluarkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 pada tanggal yang diterbitkan pada 22 Januari 2025 dimana APBD Tahun 2025 sudah ditetapkan.
2. Penggunaan Aplikasi Keuangan sering mengalami kendala sehingga memperlambat proses administrasi maupun pencairan anggaran.
3. Terbatasnya sumber daya manusia yang menangani perencanaan dan keuangan.



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

A. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Pelaporan adalah unit Pemerintahan Daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan Laporan Keuangan. Sedangkan yang merupakan entitas pelaporan adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang dalam hal ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Wonogiri.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wonogiri disajikan dengan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 92 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Wonogiri.

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah yaitu basis akrual. Namun dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas.



B. Akuntansi Pendapatan

1. Pendapatan LRA

Pendapatan diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah, diterima oleh SKPD, atau diterima entitas lain di luar pemerintah daerah atas nama BUD.

Akuntansi Pendapatan LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas. Pendapatan LRA disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila penerimaan kas atas pendapatan LRA dalam mata uang asing, maka penerimaan tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

2. Pendapatan LO

Pendapatan LO merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas pemerintah, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional, dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas pemerintah.



Pendapatan LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan atau saat pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (realized) maupun masih berupa piutang (realizable).

C. Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri.

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah Khusus untuk belanja melalui Bendahara Pengeluaran, pengakuan terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Pengguna Anggaran.

Pengukuran belanja berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

D. Akuntansi Beban

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contoh : tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah.



Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah. Sedangkan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

Pengakuan beban pada SKPD :

1. Beban Pegawai

Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme LS, diakui saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah (jika terdapat dokumen yang memadai). Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme UP/GU/TU diakui ketika bukti pembayaran beban (misal : bukti pembayaran honor) telah disahkan pengguna anggaran.

2. Beban Barang/Jasa

Beban Barang/Jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi. Beban barang diakui ketika bukti



penerimaan barang atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.

3. Pengakuan Beban

- a. Beban dari transaksi non pertukaran diukur sebesar aset yang digunakan atau dikeluarkan yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar.
- b. Beban dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (*actual price*) yang dibayarkan ataupun yang menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga.

E. Pengakuan Aset Tetap dan Kapitalisasi Pengeluaran

Pengakuan aset dan kapitalisasi pengeluaran yang diterapkan mengacu pada Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 92 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Wonogiri, dengan kebijakan sebagai berikut :

1. Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah/investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD), Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan



pembayaran. Pengertian kas ini juga termasuk setara kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan. Setara kas yang merupakan investasi jangka pendek yang sangat likuid dan siap dicairkan menjadi kas dengan jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan.

2. Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Pengakuan Piutang diakui pada saat :

- a. Diterbitkannya surat ketetapan;
- b. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan;
atau
- c. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

3. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pencatatan persediaan dilakukan dengan:

1. Metode Perpetual :

Metode perpetual digunakan untuk jenis persediaan obat-obatan di RSUD, Dinas Kesehatan serta pupuk di Dinas Pertanian, yang



bersifat continues dan membutuhkan kontrol yang besar. Dengan metode perpetual, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu ter-update.

2. Metode Periodik :

Metode periodik, digunakan untuk persediaan selain obat-obatan di RSUD, Dinas Kesehatan serta pupuk di Dinas Pertanian yang penggunaannya sulit diidentifikasi, misalnya: Alat Tulis Kantor (ATK). Dengan metode ini, pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak meng-update jumlah persediaan. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan stock opname pada akhir periode.

Penilaian Persediaan :

Harga perolehan persediaan ditentukan sebagai berikut:

- (1) Untuk persediaan yang diperoleh dari pembelian atau produksi sendiri maka harga perolehan adalah penjumlahan dari harga pembelian atau biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang yang bersangkutan ditambah biaya lainnya yang secara langsung dapat diatribusikan sampai barang persediaan siap digunakan.
- (2) Untuk persediaan yang diperoleh selain dari pembelian atau produksi sendiri (misal: donasi) dan persediaan hewan ternak/tanaman yang dibudidayakan sendiri maka harga perolehannya adalah sebesar nilai wajar, yaitu setara harga barang yang bersangkutan di pasaran. Persediaan yang berasal



dari sumbangan masyarakat atau pihak ketiga/ sejenis dinilai sesuai dengan dokumen penerimaan sumbangan. Apabila nilai dari persediaan tidak diketahui, maka dicatat dengan nilai yang wajar, yaitu nilai tukar barang untuk melakukan transaksi yang wajar.

Mekanisme penentuan nilai wajar dilakukan melalui :

- (a) Konfirmasi pada penyedia barang, seperti toko, pihak yang melakukan produksi, ataupun pihak lain yang berkompeten dengan dilengkapi surat konfirmasi.
- (b) Apabila langkah sebagaimana dimaksud huruf a tidak diperoleh, dapat dilakukan dengan mencari harga barang yang sejenis menggunakan berbagai media komunikasi yang dilengkapi dengan surat keterangan.
- (3) Untuk persediaan barang cetakan yang memiliki nilai nominal (misalnya: karcis retribusi) maka harga perolehannya adalah sebesar biaya pembelian/pembuatan bukan nilai nominalnya.

Penilaian persediaan akhir :

- (1) Persediaan dinilai dengan metode FIFO (First In First Out), yaitu harga pokok dari barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan pertama kali.
- (2) Nilai Persediaan pada akhir periode setiap barang persediaan adalah perkalian antara jumlah unit barang dari hasil stok opname dengan harga per unit barang, dimulai dari harga pembelian terakhir.



- (3) Apabila jumlah unit barang persediaan akhir lebih besar daripada jumlah unit pembelian terakhir maka nilai barang kelebihannya diperhitungkan dengan harga beli sebelumnya.

4. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan, terdiri dari :

- a. Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yaitu yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, terdiri dari :
 - Pembelian Surat Utang Negara;
 - Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
 - Investasi non permanen lainnya.
- b. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, terdiri dari :
 - Penyertaan Modal pemerintah daerah pada perusahaan Negara/ perusahaan daerah, lembaga keuangan Negara, badan hukum milik Negara, badan internasional dan badan hukum lainnya bukan milik Negara;
 - Investasi permanen lainnya.

5. Aset Tetap

Aset Tetap adalah aktiva berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah dan pelayanan publik. Aktiva Tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui



pembelian, pembangunan, donasi dan pertukaran dengan aktiva lainnya, yang termasuk klasifikasi aset tetap yaitu : Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Jaringan dan Irigasi, Aset Tetap Lainnya serta Konstruksi Dalam Pengerjaan.

A. Penilaian Aset Tetap

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

B. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) dan dana cadangan. Aset lainnya antara lain aset tak berwujud, kemitraan dengan pihak ketiga, kas yang dibatasi penggunaannya, dan aset lain-lain. Termasuk dalam aset lainnya adalah alokasi anggaran dana bergulir dimasukkan sebagai Belanja Modal Fisik Lainnya seperti temak gaduhan.

C. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek di PPKD diantaranya:

- 1) Utang Bunga;
- 2) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang;
- 3) Utang Beban; dan
- 4) Utang Jangka Pendek Lainnya;



Kewajiban jangka pendek di SKPD diantaranya:

- 1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
- 2) Pendapatan Diterima Dimuka;
- 3) Utang Beban; dan
- 4) Utang Jangka Pendek Lainnya.

9. Kewajiban Jangka Panjang :

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan Kewajiban jangka panjang hanya terdapat di PPKD, diantaranya:

- 1) Utang Dalam Negeri;
- 2) Utang Luar Negeri; dan
- 3) Utang Jangka Panjang Lainnya Ekuitas.

10. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain. Ekuitas terdiri dari :

1. Ekuitas SAL

Ekuitas SAL digunakan untuk mencatat akun perantara dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL mencakup antara lain Estimasi Pendapatan, Estimasi Penerimaan



Pembiayaan, Apropriasi Belanja, Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan,
dan Estimasi Perubahan SAL, Surplus/Defisit - LRA.

2. Ekuitas untuk Dikonsolidasikan Ekuitas untuk Dikonsolidasikan
digunakan untuk mencatat reciprocal account untuk kepentingan
konsolidasi, yang mencakup antara lain Rekening Koran (R/K) PPKD.



BAB V

PENJELASAN POS - POS LAPORAN KEUANGAN

A. Penjelasan Pos - Pos Laporan Realisasi Anggaran

1. Pendapatan

Inspektorat Kabupaten Wonogiri bukan OPD yang menangani pendapatan sehingga pada tahun anggaran 2025 Inspektorat Kabupaten Wonogiri tidak mempunyai pendapatan.

2. Belanja

Pada Tahun Anggaran 2025 jumlah total realisasi belanja Inspektorat Kabupaten Wonogiri adalah Rp 7.437.578.238,00 atau 85,05% dari pagu anggaran sebesar Rp. 8.744.904.562,00. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 7.282.653.749,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 154.924.489,00.

Rincian realisasi belanja periode 1 Januari s/d 31 Desember 2025 disajikan dalam table berikut :

Tabel 5.1.
Realisasi Anggaran per Kelompok dan Jenis Belanja

Kode Rek.	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
5.	Belanja terdiri :	8.744.904.562,00	7.437.578.238,00	85,05	7.282.653.749,00
5.1.	Belanja Operasi	8.626.595.062,00	7.325.368.238,00	84,92	7.237.648.749,00
5.1.01	a. Belanja Pegawai	7.492.023.755,00	6.331.824.516,00	84,51	5.674.280.211,00
5.1.02	b. Belanja Barang & Jasa	1.134.571.307,00	993.543.722,00	87,57	1.563.368.538,00
5.2	Belanja Modal	118.309.500,00	112.210.000,00	94,84	45.005.000,00
	J U M L A H	8.744.904.562,00	7.437.578.238,00	85,05	7.282.653.749,00



2.1. Belanja Operasi :

Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp 7.325.368.238,00 atau 84,92% dari pagu anggaran sebesar Rp 8.626.595.062,00 meliputi Belanja Pegawai sebesar Rp 6.331.842.516,00 dan Belanja Barang & Jasa sebesar Rp 993.543.722,00.

Realisasi belanja operasi berdasarkan obyek, diuraikan sebagai berikut :

2.1.1. Belanja Pegawai :

Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp 6.331.824.516,00 atau 84,51 % dari pagu anggaran sebesar Rp 7.492.023.755,00 dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 Rp 5.674.280.211,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 657.544.305,00.

Realisasi belanja pegawai periode 1 Januari s/d 31 Desember 2025 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 5.2.
Perincian Belanja Pegawai

Kode Rek.	Obyek Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
5.1.01.01	Belanja Gaji & Tunjangan ASN	4.132.023.755,00	3.339.178.466,00	80,81	2.976.262.461,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	3.360.000.000,00	2.992.646.050,00	89,07	2.698.017.750,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	-	-	-	420.000
	J U M L A H	7.492.023.755,00	6.331.824.516,00	84,51	5.674.700.211,00



2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi sebesar Rp 993.543.722,00 atau 87,57 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 1.134.571.307,00 dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 1.563.368.538,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 569.824.816,00.

Realisasi belanja Barang dan Jasa periode 1 Januari s/d 31

Desember 2025, disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 5.3.
Perincian Belanja Barang dan Jasa

Kode Rek	Obyek Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	349.771.612,00	300.240.549,00	85,84	400.078.908,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	290.424.000,00	262.027.201,00	90,22	331.410.290,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan / Asuransi	30.488.575,00	10.197.000,00	33,45	10.597.098,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	5.000.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/ Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan & Pelatihan	120.000.000,00	113.554.500,00	94,63	137.989.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan & Mesin	62.345.520,00	61.284.786,00	98,30	98.946.989,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.440.000,00	4.437.500,00	99,94	69.746.500,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	-	-	9.986.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	272.101.600,00	236.802.186,00	87,03	499.613.753,00
J U M L A H		1.134.571.307,00	993.543.722,00	87,57	1.563.368.538,00



2.2. Belanja Modal :

Pada Tahun Anggaran 2024 dianggarkan untuk belanja modal sejumlah Rp 45.005.000,00, sedangkan pada Tahun 2025 belanja modal sebesar Rp 118.309.500,00.

Adapun tabel belanja modal disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 5.4.
Perincian Belanja Modal

Kode Rek	Obyek Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	118.309.500,00	112.210.000,00	94,84	43.080.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan	-	-	-	1.925.000,00
J U M L A H		118.309.500,00	112.210.000,00	94,84	45.005.000,00

B. Penjelasan Pos - Pos Laporan Operasional

Jumlah Beban Operasi Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 7.400.431.793,81 dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 7.118.049.388,81 mengalami kenaikan Rp. 282.382.405,00 atau 3,97 %
Realisasi beban operasi pada tahun 2025 disajikan sebagai berikut :

Tabel 5.5.
Perincian Beban

Kode Rek	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Naik / Turun	%
8.1	Beban Operasi	7.400.431.793,81	7.188.049.388,81	212.382.405,00	3,97
8.1.01	Beban Pegawai	6.331.824.516,00	5.479.804.452,00	852.020.064,00	15,55
8.1.02	Beban Barang & Jasa	991.378.190,00	1.561.979.224,00	(570.601.034,00)	(36,53)



8.1.08	Beban Penyusutan & Amortisasi	77.229.087,81	76.265.712,81	963.375	1,26
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan & Mesin	71.158.625,00	70.291.500,00	867.125	1,23
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung & Bangunan	5.877.962,81	5.877.962,81	(5.877.962,81)	-
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	192.500,00	96.250,00	96.250,00	100
	J U M L A H	(7.429.132.693,81)	(7.118.049.388,81)	(311.083.305)	4,37

8.1. Beban Operasi

Beban Operasi pada Tahun 2025 sebesar Rp. 7.400.431.793,81 dengan rincian sebagai berikut :

8.1.01 Beban Pegawai periode 1 Januari s/d 31 Desember 2025 sebesar Rp. 6.331.824.516,00 dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 5.479.804.452,00 mengalami kenaikan Rp. 852.020.064,00 atau 15,55 %, dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 5.6.
Perincian Beban Pegawai

Kode Rek	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024
8.1.01.01	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	3.339.178.466,00	2.969.784.502,00
8.1.01.02	Beban Tambahan Penghasilan ASN	2.992.646.050,00	2.509.599.950,00
	J U M L A H	6.331.824.516,00	5.479.804.452,00



8.1.02. Beban Barang dan Jasa periode 1 Januari s/d 31 Desember 2025 sebesar Rp 991.378.190,00 dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 1.561.979.224,00 mengalami penurunan Rp. (570.601.034) atau (36,53 %), dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 5.7.
Perincian Beban Barang dan Jasa

Kode Rek.	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024
8.1.02.01	Beban Barang	298.958.349,00	399.336.808,00
8.1.02.02	Beban Jasa	389.895.369,00	484.349.174,00
8.1.02.03	Beban Pemeliharaan	65.722.286,00	178.679.489,00
8.1.02.04	Beban Perjalanan Dinas	236.802.186,00	499.613.753,00
	J U M L A H	991.378.190,00	1.561.979.224,00

8.1.02.01. Beban Barang periode 1 Januari s/d 31 Desember 2025 sebesar Rp. 298.958.349,00 dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp399.336.808,00 mengalami penurunan Rp100.979.459,00 atau (25,15 %), dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 5.8.
Perincian Beban Barang

Kode Rek.	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024
8.1.02.01.0004	Beban Bahan Bakar & Pelumas	47.518.769,00	41.620.378,00
8.1.02.01.0009	Beban Bahan Isi Tabung Pemadam Kebakaran	450.000,00	202.500,00
8.1.02.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – ATK	42.723.250,00	54.983.390,00



Pemerintah Kabupaten Wonogiri
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025

8.1.02.01.0025	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Kertas dan Cover	10.018.300,00	26.357.600,00
8.1.02.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Cetak	39.078.780,00	48.472.840,00
8.1.02.01.0027	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Benda Pos	1.994.000,00	4.000.000,00
8.1.02.01.0029	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Komputer	12.497.600,00	17.043.300,00
8.1.02.01.0030	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Perabot Kantor	12.669.000,00	22.761.700,00
8.1.02.01.0031	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Alat Listrik	1.670.000,00	1.964.000,00
8.1.02.01.0036	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan kantor untuk Kegiatan Kantor Lainnya	14.721.200,00	22.060.000,00
8.1.02.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	78.383.950,00	98.811.600,00
8.1.02.01.0053	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	37.233.500,00	61.059.500,00
	J U M L A H	298.958.349,00	399.336.808,00

8.1.02.02. Beban Jasa Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2025 sebesar Rp. 389.895.369,00 dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.484.349.174,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 94.453.805,00 atau (19,50%). Adapun perincian Beban Jasa adalah sebagai berikut :

Tabel 5.9.
Perincian Beban Jasa

Kode Rek.	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024
8.1.02.02.01	Beban Jasa Kantor	261.143.869,00	330.763.076,00
8.1.02.02.02	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	10.197.000,00	10.597.098,00
8.1.02.02.04	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	5.000.000,00	5.000.000,00



8.1.02.02.12	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	113.554.500,00	137.989.000,00
	J U M L A H	389.895.369,00	484.349.174,00

8.1.02.03 Beban Pemeliharaan Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2025 sebesar Rp. 65.722.286,00 dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 178.679.489,00 mengalami penurunan Rp. 112.957.203,00 atau (63,22%). Adapun perincian Beban Pemeliharaan Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.10.

Perincian Beban Pemeliharaan

Kode Rek.	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024
8.1.02.03.02	Beban Pemeliharaan Peralatan & Mesin	61.284.786,00	98.946.989,00
8.1.02.03.03	Beban Pemeliharaan Gedung & Bangunan	4.437.500,00	69.746.500,00
8.1.02.03.04	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigas	-	9.986.000,00
	J U M L A H	65.722.286,00	178.679.489,00

8.1.02.04. Beban Perjalanan Dinas periode 1 Januari s/d 31 Desember 2025 sebesar Rp. 236.802.186,00 sedangkan untuk realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 499.613.753,00 atau mengalami



penurunan sebesar Rp. 262.811.567,00 atau
(52,60%), dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.11.

Perincian Beban Perjalanan Dinas

Kode Rek.	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024
8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	212.203.997,00	468.963.953,00
8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	24.598.189,00	30.649.800,00
	J U M L A H	236.802.186,00	499.613.753,00

8.2. Beban Penyusutan dan Amortisasi, terdiri dari :

8.2.01. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin periode 1 Januari
s/d 31 Desember 2025 sebesar Rp. 71.158.625,00
sedangkan untuk realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar
Rp. 70.291.500,00 atau mengalami kenaikan sebesar
Rp. 867.125,00 atau 1,23 %, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.12.

Perincian Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

Kode Rek.	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024
8.1.08.01.05	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	19.070.000,00	21.306.500,00
8.1.08.01.06	Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	103.125,00	206.250,00
8.1.08.01.07	Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	98.000,00	196.000,00
8.1.08.01.10	Beban Penyusutan Komputer	51.887.500,00	48.582.750,00
	J U M L A H	71.158.625,00	70.291.500,00



8.1.08.02. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan 1 Januari s/d 31 Desember 2025 sebesar Rp. 5.877.962,81 sedangkan untuk realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 5.877.962,82 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.13.
Perincian Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

Kode Rek.	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024
8.1.08.02.01	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	5.877.962,81	5.877.962,81
	J U M L A H	5.877.962,81	5.877.962,81

8.1.08.03. Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi, 1 Januari s/d 31 Desember 2025 sebesar Rp. 192.500,00, sedangkan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 96.250,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.14.
Perincian Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi

Kode Rek.	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024
8.1.08.02.01	Beban Penyusutan Jaringan	192.500,00	96.250,00
	J U M L A H	192.500,00	96.250,00

C. Penjelasan Pos - Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Ekuitas awal pada Laporan Perubahan Ekuitas sebesar Rp 1.042.330.513,56 berasal dari nilai ekuitas akhir tahun 2024, RK PPKD sebesar Rp7.437.578.238,00 merupakan realisasi belanja daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Tahun 2025. Sedangkan Surplus / Defisit sebesar



(Rp 7.429.132.693,81) merupakan selisih antara jumlah pendapatan yang diterima dikurangi jumlah beban pada laporan Operasional. Adapun untuk Ekuitas Akhir Tahun 2025 sebesar Rp. 1.050.776.057,75

D. Penjelasan Pos - Pos Neraca

1. Aset

Berdasarkan pada perhitungan aset tahun 2025 baik terhadap aset lancar, aset tetap maupun aset lainnya, maka dapat dijelaskan posisi aset Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2025 sebagai berikut :

a. Aset Lancar

Jumlah dari aset lancar sebesar Rp 5.526.400,00 adalah merupakan sisa dari :

- Alat/Bahan untuk kegiatan kantor–Alat Tulis Kantor
Rp.3.259.400,00.
- Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Kertas dan Cover
Rp.232.000,00.
- Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Perabot Kantor
Rp.1.281.500,00.
- Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat Listrik Rp.400.500,00.
- Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat Untuk Kegiatan Kantor Lainnya Rp.353.000,00.

b. Aset Tetap

Jumlah nilai buku aset tetap adalah Rp. 1.048.468.588,75 untuk rincian aset tetap disajikan dalam tabel berikut :



Tabel 5.14.
Perincian Aset Tetap menurut Jenis

No.	Uraian	2025	2024	Naik / Turun
1	Tanah	779.922.000,00	779.922.000,00	0,00
2	Peralatan & Mesin	2.461.399.738,00	2.103.757.238,00	357.642.500,00
3	Gedung & Bangunan	492.223.350,00	492.223.350,00	0,00
4	Jalan, Irigasi & Jaringan	1.925.000,00	1.925.000,00	0,00
5	Aset Tetap Lainnya	25.277.445,00	25.277.445,00	0,00
6	Akumulasi Penyusutan	(2.712.278.944,25)	(2.390.547.356,44)	(321.731.588,00)
	JUMLAH ASET TETAP	1.053.994.988,75	1.045.502.776,56	8.492.213,00

Mutasi aset tambah tetap tahun 2025 diuraikan sebagai berikut

1). Mutasi Tambah :

Mutasi tambah aset tahun 2025 adalah : Rp. 0,00 (Nihil)

Rincian aset tetap berdasarkan klasifikasi per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

2). Tanah untuk Bangunan Kantor Inspektorat Kabupaten Wonogiri seluas 1.111 meter persegi dengan Nomor Sertifikat : HP. 122 Tertanggal 24 September 2020 dengan status Hak Pakai dan merupakan Tanah Negara senilai Rp. 779.922.000,00

3). Nilai Buku Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 senilai Rp 2.461.399.738,00 terdiri dari :

a) Nilai Buku Alat - Alat Angkutan senilai Rp 1.523.378.059,00 dengan rincian sebagai berikut :

Saldo awal Januari 2025 1.278.875.559,00



Penambahan Tahun 2025	244.502.500,00 +
	2.461.399.738,00

Nilai Buku per 31 Desember 2025 2.461.399.738,00

- b) Nilai Buku Alat Kantor dan Rumah Tangga senilai 303.742.587,00 dengan rincian sebagai berikut :

Saldo awal Januari 2025	287.382.587,00
Penambahan Tahun 2025	16.360.000,00 +
Jumlah Alat Kantor dan Rumah Tangga	303.742.587,00
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	272.877.337,00 -
Nilai Buku per 31 Desember 2025	30.865.250,00

- c). Nilai Buku Alat - Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar senilai 62.354.100,00 dengan rincian sebagai berikut :

Saldo awal Tahun 2025	62.354.100,00
Penambahan Tahun 2025	0,00 +
Jumlah Alat – Alat Studio, Komunikasi & Pemancar	62.354.100,00
Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi & Pemancar	62.354.100,00 –
Nilai Buku per 31 Desember 2025	0,00

- d). Nilai Buku Alat Kedokteran dan Kesehatan senilai 980.000,00, dengan rincian sebagai berikut :

Saldo awal Januari 2025	980.000,00
Penambahan Tahun 2025	0,00 +
Jumlah Alat Kedokteran dan Kesehatan	980.000,00
Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran & Kesehatan	980.000,00
Nilai Buku per 31 Desember 2025	0,00



e). Nilai Buku Komputer senilai 570.944.992,00 dengan rincian sebagai berikut :

Saldo awal Januari 2025	474.164.992,00
Penambahan Tahun 2025	96.780.000,00 +
	570.944.992,00
Akumulasi Penyusutan Komputer	436.966.617,00 -
Nilai Buku per 31 Desember 2025	133.978.375,00

3). Nilai Buku Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 senilai 492.223.350,00 dengan rincian sebagai berikut :

Saldo awal Januari 2025	492.223.350,00
Penambahan Tahun 2025	0,00 +
Jumlah Gedung dan Bangunan	492.223.350,00
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	415.434.081,24 -
Nilai Buku per 31 Desember 2025	76.789.268,76

4). Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan sampai dengan Tahun 2025
Inspektorat Kabupaten Wonogiri memiliki jaringan listrik senilai Rp. 1.925.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Saldo awal Januari 2025	1.925.000,00
Penambahan Tahun 2025	0,00 +
Jumlah Aset jalan, irigasi dan jaringan	1.925.000,00
Akumulasi Penyusutan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan	288.750,00 -
Nilai Buku per 31 Desember 2025	1.636.250,00



5). Nilai Buku Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2025 senilai

Rp 25.277.445,00 terdiri dari :

Bahan Perpustakaan senilai Rp 25.277.445,00 dengan rincian sebagai berikut :

Saldo awal Januari 2025	25.277.445,00
Penambahan Tahun 2025	0,00 +
Pengurangan Tahun 2025	0,00 -
Jumlah Buku dan Perpustakaan	25.277.445,00
Akumulasi Penyusutan Buku dan Perpustakaan	0,00 -
Nilai Buku per 31 Desember 2025	25.277.445,00

6). Sampai dengan Tahun 2025, Inspektorat Kabupaten Wonogiri memiliki Aset Lainnya senilai Rp. 0,00.

2. Kewajiban

Sampai dengan 31 Desember 2025 Inspektorat Kabupaten Wonogiri mempunyai kewajiban sebesar Rp 3.218.931,00 berupa hutang belanja jasa bulan Desember 2025 sebesar Rp. 3.218.931,00, dengan rincian sebagai berikut :

Hutang Jasa Telepon	Rp. 56.557,00
Hutang Jasa Air	Rp. 207.650,00
Hutang Jasa Listrik	Rp. 2.106.124,00
Hutang Jasa Internet	<u>Rp. 848.600,00</u>
J U M L A H	Rp. 3.218.931,00



3. Ekuitas Dana

Sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Perubahan Ekuitas, jumlah Ekuitas Akhir per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp 1.050.776.057,75 dengan rincian sebagai berikut :

Ekuitas Awal (2024)	Rp	1.042.330.513,56
RK PPKD	Rp.	7.437.578.238,00
Surplus/Defisit - LO	Rp.	(7.429.132.693,81)
J U M L A H	Rp.	1.050.776.057,75



BAB VI

PENGUNGKAPAN LAINNYA, INFORMASI NON KEUANGAN

A. Organisasi

Inspektorat Kabupaten Wonogiri merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 99 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, lokasi Kantor Inspektorat berdomisili di Jalan Pemuda I Nomor 55 Wonogiri.

Inspektorat berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Inspektur
2. Sekretaris, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Keuangan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Sub Koordinator Perencanaan.
3. Inspektur Pembantu Bidang Aparatur dan Administrasi Pemerintahan
4. Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi dan Pembangunan
5. Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat
6. Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Aset Daerah
7. Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi.

Sebagai lembaga teknis daerah Inspektorat mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 99 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Wonogiri, yaitu :



1. Inspektorat Daerah mempunyai tugas : membantu Bupati dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
2. Inspektorat daerah melaksanakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantapan dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan atau Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;
 - d. Penyusunan laporan pengawasan;
 - e. Pelaksanaan koordinasi Pencegahan tindak pidana korupsi;
 - f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 - g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah, dan;
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. Kebijakan

Untuk memperlancar pelaksanaan Tupoksi tersebut diatas, setiap tahun Inspektorat Kabupaten Wonogiri menetapkan Kebijakan Pengawasan yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Wonogiri. Untuk tahun 2025 ditetapkan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor : 91 Tahun 2022 tentang Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dan



Pemerintahan Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri Tahun 2025.

Dalam Peraturan Bupati tersebut, Inspektorat Kabupaten Wonogiri selama Tahun 2025 melakukan kegiatan pengawasan dengan fokus sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan terhadap program, kegiatan, Sub kegiatan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan / atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 dengan sasaran prioritas daerah yang memiliki resiko tinggi dan daya ungkit untuk meningkatkan perekonomian daerah, seperti urusan pariwisata.
2. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk :
 - a. Pemeriksaan / audit ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang – undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan / atau
 - b. Pemeriksaan / audit kinerja;
3. Pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yaitu :
 - a. Review dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah dengan fokus :
 - Rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah;



- Rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah;
 - Rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah.
- b. Pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah dengan fokus :
- Akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah;
 - Akuntabilitas pengelolaan belanja daerah;
 - Pengelolaan pembiayaan daerah;
 - Pengelolaan manajemen kas dan persediaan;
 - Pengelolaan barang milik daerah.
- c. Reviu laporan keuangan, memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, khususnya terhadap pengelolaan kas daerah, persediaan dan pencatatan piutang.
- d. Kegiatan pengawasan lainnya dengan fokus :
- Probit audit;
 - Laporan kinerja (reviu);
 - Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (reviu);
 - Perhitungan kerugian keuangan daerah (pemeriksaan dengan tujuan tertentu);
 - Perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (responsif gender);
 - Pengelolaan Keuangan desa (pemeriksaan);
 - Pengawasan terhadap manajemen ASN.



4. Penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan integritas dengan fokus :
 - a. Pengendalian Gratifikasi;
 - b. Pelaksanaan survey penilaian integritas ;
 - c. Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi dan zona integritas;
 - d. Asistensi pembangunan reformasi birokrasi;
 - e. Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi;
 - f. Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - g. Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar;
 - h. Monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan dan whistle Blowing System (WBS);
 - i. Pemeriksaan investigatif / kasus;
 - j. Tindak lanjut perjanjian kerjasama aparat pengawas intern pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan / pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi;
 - k. Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas intern pemerintah.
5. Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah dengan fokus :
 - a. Kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah level 3;



- b. Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah;
- c. Penerapan manajemen resiko;
- d. Pendidikan profesional berkelanjutan minimal 20/120 jam per tahun.

C. Struktur Kepegawaian / SDM

Jumlah Pegawai Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2025
sebanyak 44 orang, terdiri :

1. Berdasar Jenjang Pendidikan :

- a. Pasca Sarjana (S2) : 10 orang
- b. Sarjana (S1) : 28 orang
- c. Sarjana Muda/Diploma : 4 orang
- d. SLTA : 1 orang
- e. SLTP : -
- f. SD : 1 orang

2. Berdasar Golongan :

- a. Golongan IV : 14 orang
- b. Golongan III : 27 orang
- c. Golongan II : 1 orang
- d. Golongan I : -

3. Berdasar Jabatan :

- a. Pejabat Struktural 8 orang, terdiri dari :
 - 1) Eselon II : 1 orang
 - 2) Eselon III : 5 orang
 - 3) Eselon IV : 2 orang



- b. Pejabat Fungsional Auditor 20 orang, terdiri dari :
 - 1) Auditor Ahli Utama : 1 orang
 - 2) Auditor Ahli Madya : 4 orang
 - 3) Auditor Ahli Muda : 1 orang
 - 4) Auditor Ahli Pertama : 8 orang
 - 5) Auditor Ahli Penyelia : 2 orang
 - 6) Auditor Pelaksana Lanjutan : -
 - 7) Auditor Pelaksana : -
 - 8) CPNS Auditor Ahli Pertama : 4 orang
- c. Pejabat Fungsional PPUPD Ahli Madya : 1 orang
- d. Pejabat Fungsional PPUPD Ahli Muda : 1 orang
- e. Pejabat Fungsional PPUPD Ahli Pertama : 1 orang
- f. CPNS Pejabat Fungsional PPUPD Ahli Pertama : 3 orang
- g. Pranata Komputer Ahli Muda : 1 orang
- h. Pranata Komputer Mahir : 2 orang
- i. CPNS Pranata Komputer Terampil : 1 orang
- j. Pejabat Fungsional Umum : 4 orang;
- k. Pejabat Fungsional Perencana Muda : -
- l. PPPK Penuh Waktu : 2 orang
- 4. Data Pegawai menurut jenis kelamin :
 - a. Jumlah pegawai laki-laki : 21 orang
 - b. Jumlah pegawai perempuan : 23 orang
- 5. Jumlah Pegawai Non ASN (Kontrak) pada Kantor Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2025 sebanyak 7 orang, yang terdiri :



Pemerintah Kabupaten Wonogiri
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025

- a. Pengemudi / Sopir : 4 orang
- b. Penjaga keamanan : 2 orang
- c. Petugas Kebersihan : 1 orang.



BAB VII

PENUTUP

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Inspektorat Kabupaten Wonogiri merupakan rangkaian informasi terkini atas kondisi riil aspek keuangan Tahun Anggaran 2025 yang penyusunannya didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Catatan atas Laporan Keuangan ini disusun dengan mengungkapkan beberapa penjelasan terhadap Laporan Keuangan secara keseluruhan sehingga diharapkan dapat dengan mudah dibaca dan dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun hanya manajemen entitas pelaporan.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyajian Catatan atas Laporan Keuangan ini masih jauh dari sempurna. Masukan dan saran selalu kami harapkan khususnya demi peningkatan kualitas pengelolaan dan akuntabilitas keuangan Inspektorat Kabupaten Wonogiri.

Semoga Tuhan yang Maha Esa memberikan bimbingan dan meridhoi upaya yang telah kita lakukan.

Wonogiri, 18 Februari 2026

INSPEKTUR

KABUPATEN WONOGIRI



MARDIANTO, S.E.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19710124 199903 1 002